



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON/FAXIMILE: 021 - 3453284
WEBSITE: <http://www.kemenkopmk.go.id>

Nomor : B-1668/D-I/KPS.01.00/07/2024 Jakarta, 02 Juli 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Percepatan Akses, Pemanfaatan, dan Verifikasi dan Validasi (Verval)
Data P3KE 2024**

Kepada Yth.

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

di -
tempat

Menindalajuti surat Kami sebelumnya No. B-464/D-I/KPS.01.00/02/2024 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, kami mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah berdasarkan perhitungan estimasi tersebut.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan dan berkelanjutan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), bersama ini kami sampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Data P3KE terus-menerus dimutakhirkan secara rutin berdasarkan: (i) Pendataan Keluarga (PK) yang dilakukan tiap tahun oleh BKKBN dan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kemendagri, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos; (ii) Data balikan dari pemerintah daerah yang disahkan oleh kepala daerah; dan (iii) Usulan data keluarga miskin ekstrem yang belum masuk dalam Data P3KE maupun DTKS;
2. Data P3KE 2024 merupakan data mutakhir yang dihitung berdasarkan Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2023, data balikan dari pemerintah daerah dan data balikan dari Kementerian dan Lembaga yang memanfaatkan data P3KE. Data tersebut telah dapat diakses sejak tanggal 26 Februari 2024. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengakses data tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi di daerah masing-masing dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sebagai dasar intervensi program di daerah;
3. Untuk optimalisasi pemanfaatan data P3KE diharapkan penanggung jawab data di *masing-masing daerah* dapat berbagi-pakai data tersebut ke OPD dan Dinas terkait lainnya, serta pemerintah desa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Desa

yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4. Terkait dengan poin-poin di atas, terlampir kami sampaikan informasi proses bisnis akses data dan pemanfaatan Data P3KE, serta Petunjuk Teknis Verifikasi dan Validasi Data P3KE sebagai dasar dalam melakukan upaya-upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah yang dapat diunduh pada tautan bit.ly/Akses_dan_Juknis_P3KE24.

Selanjutnya, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan informasi tersebut dan terus berpartisipasi aktif dalam upaya nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai target Inpres No. 4 Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial selaku Ketua
Satgas Pengelola Data P3KE,



Nunung Nuryartono
Prof. Dr. Nunung Nuryartono

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;
6. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Ketua Satuan Tugas Konvergensi Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Sekretariat Kabinet;
7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;